

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. dan Rachmawati Meita. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4 (2) : 190 – 205.
- Afkarina, Z. dan Suwardi Bambang. 2017. Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (8) : 1-18.
- Anggraeni, Rina. 2018. Daerah Bayar THR Pakai APBD Ancam Gangguan Proyek Infrastruktur, diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/read/1313187/34/daerah-bayar-thr-pakai-apbd-ancam-ganggu-proyek-infrastruktur-1528613263>. Tanggal 10 Juni 2018.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntan Sektor Publik*. PT Indeks. Jakarta.
- Dewi, S. P. dan Suyanto. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah. *Potensio* 20 (2) : 79-100.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jemparut, M. S. dan Akhmad Riduwan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (9) : 1-18.
- Jiwatami, S. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada

Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.

Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03.2000 tentang Tata Cara Penyaluran DAU dan DAK.

Lestari, W. P., dan Sapari. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (6) : 1-17.

Mardiasmo. 2002. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Novianto, R., dan Rafiudin Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi* 4 (1) : 1-22.

Nuarisa, S. A. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1) : 89-95.

Nugraha, I. P. dan Dwirandra. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14 (1) : 284-311.

Paramartha, M. F. dan I Gusti Ayu. 2016. Analisisflypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15 (2) : 1536- 1564.

Pelealu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA* 1 (4) : 1189-1197.

Peraturan Menteri Dalam Negri RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Prastiwi, Ayu, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO* : 872-879.
- Silitonga, L.T. 2012. SBY : Sebagian SILPA untuk infrastruktur, diakses melalui isitus <http://www.bisnis.com/articles/sby-sebagian-silpa-untuk-infrastruktur>. Tanggal 20 November 2012.
- Sholikhah, I dan Wahyudin A. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*.
- Sugiardi, N. P. dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7 (2) : 477-495.
- Suhendi, Chrisna, dkk. *Laboratorium Statistik dengan SPSS*. Semarang: Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula.
- Sulardi dan Ulva Navatilova Menes. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 14 (2) : 155-266.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Belanja Modal.
- Widarjono, A. 2015. *Statistik Terapan dengan Excel & SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.